

Pembangunan Tol Trans-Sumatra Harus Ditender

PEMERINTAH diminta transparan dalam pembangunan jalan tol Trans-Sumatra yang membentang dari Bakauheni, Lampung, hingga Bandara Hang Nadim, Batam. Hal itu harus dilakukan karena mega-proyek senilai Rp330 triliun itu akan memakai dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Pembangunan proyek ini harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua BUMN bidang karya (konstruksi) untuk berpartisipasi lewat proses tender yang transparan. Bukan lewat penunjukan langsung yang rawan dengan manipulasi dan korupsi," ujar praktisi dan

pengamat hukum publik Feizal Syahmenan melalui siaran pers diskusi terkait tol Trans-Sumatra di Jakarta, kemarin.

Demikian halnya ketika jalan tol tersebut sudah selesai, pemerintah harus memberikan kesempatan yang sama lewat tender kepada semua BUMN untuk menjadi pengelola jalan tol tersebut.

"Tujuan dari pembangunan jalan tol Trans-Sumatra itu bagus, mempercepat pembangunan masyarakat dan daerah Sumatra. Namun, penunjukan langsung kepada perusahaan tertentu untuk membangun dan menjadi operator jalan tol Trans-Sumatra harus lewat tender karena menggunakan

dana APBN ratusan triliun rupiah," ujarnya.

Menurutnya, tidak benar penunjukan Hutama Karya untuk membangun dan mengelola jalan tol Trans-Sumatra karena tidak adanya badan usaha lain yang berminat, meski sudah dilakukan beberapa kali tender.

"Hanya ruas Medan-Binjai dan Palembang-Indralaya yang pernah ditenderkan dan memang tidak ada yang berminat karena tanpa skema dukungan pemerintah, artinya semuanya dana perusahaan. Tapi bila tender disertai dukungan pemerintah, akan banyak badan usaha yang berminat."

Karena itu, ia mengusulkan

proses pembuatan peraturan presiden (perpres) sebagai payung hukum penunjukan langsung Hutama Karya itu segera dihentikan.

Di tempat yang sama, Ketua jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Budi Kusuma menegaskan permasalahan utama pembangunan jalan tol termasuk tol Trans-Sumatra adalah di pembebasan lahan. "Jika belum apa-apa Hutama Karya sudah meminta Rp5 triliun, sedangkan waktu penyelesaiannya tidak dapat dipastikan, dana sebesar itu tidak jelas pemanfaatannya dan pertanggungjawabannya," tukasnya. (Atp/E-5)